# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah ialah sebuah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU Nomor 22 tahun 1999 yang sekarang telah di revisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Menurut Ulum, 2004 Organisasi sektor publik merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk memproduksi dan menyediakan barang publik. Pemahaman tentang sektor publik sebagai entitas yang memiliki hubungan aktivitas, yang kemudian menghasilkan barang guna pelayanan publik yang dapat memenuhi hak serta kewajiban publik.

Organisasi sektor publik sendiri dalam prosesnya sekarang ini dimodifikasi dengan adanya fenomena menguatnya akuntabilitas dari organisasi publik itu sediri, baik dalam pusat atau daerah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang ataupun instansi yang telah menentukan pilihannya dengan tindakannya. Upaya guna mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemda merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang berwujud laporan keuangan, kemudian laporan keuangan pemerintah tersebut diberikan kepada DPR/ DPRD serta masyarakat setelah sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Menurut Undang-Undang Nomor 17 pada Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara dan Undang-Undang No 23 pada Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan ialah bentuk tanggung jawab atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang dihasilkan juga harus memenuhi prinsip tepat waktu dan susunannya disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 pada Tahun 2005 yang digantikan dengan peraturan pemerintah Nomor 71 pada Tahun 2010 yaitu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan atas dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) adalah pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga memungkinkan para pengguna laporan keuangan dapat mengakses hasil yang berhasil dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang telah diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku supaya laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuagan entitas lain. Informasi didalam sebuah laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan pemerintah, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan yang tersedia, termasuk laporan non keuangan dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan. Untuk gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan satu periode.

Dengan adanya laporan keuangan, yaitu dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami bertepatan dengan posisi keuangan serta seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu pula dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dimana pada setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sebuah opini. Ada empat opini yang diberikan oleh BPK selaku pemeriksa, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak untuk memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Dengan contoh, Apabila BPK memberi sebuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) itu artinya, dapat dikatakan laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Pencapaian WTP untuk Bantul telah diraih selama empat tahun berturut-turut yaitu sejak 2012 sampai 2015. Sekda mengatakan dari beberapa catatan dalam LHP BPK atas keuangan Bantul 2015 tidak ada satupun yang mengarah pada penyimpangan penggunaan anggaran atau yang mengarah pada kerugian negara. Namun demikian, kata dia, secara gamblang dijelaskan dalam LHP BPK terdapat 16 temuan terdiri dari kelemahan pengendalian 11 temuan dan lima temuan tidak patuh, namun semua dalam rangkaian administrasi, sehingga tidak pengarah pada pelanggaran. (www.bantulkab.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 pada Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah telah dijelaskan bahwasanya dalam tindak lanjut proses pembangunan yang searah dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance), pemerintah dan Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sehingga nantinya dapat menciptakan dan meningkatkan kemampuan pengelola keuangan daerah dan menyambungkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Sehingga perlu adanya optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk pembangunan jaringan Sistem Informasi Manajemen.

| No | Nama Pemda | Opini BPK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Provinsi DIY | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 2. | Kota Yogyakarta | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 3. | Kab. Bantul | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4. | Kab. Sleman | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 5. | Kab. Kulon Progo | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 6. | Kab. Gunungkidul | WDP | WDP | WDP | WTP |

*Sumber : Website BPK RI*

Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh laporan keuangan daerah, diantaranya yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan

sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Andini dan Yusrawati (2015) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu Fikri (2015) melakukan sebuah penelitian yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern (SPI), dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini dilakukan pada kabupaten Bantul, sehingga penelitian ini diberi judul :

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Penelitian ini kompilasi dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, yaitu : Sudiarti, et al (2015) dan ada beberapa peneliti yaitu : Nurillah dan Muid (2014) ; Udiyanti, et al (2014) ; Putri (2014) ; Emilda (2014) ; Andini dan Yusrawati (2015). Bahwa terdapat beberapa signifikasi yang berbeda dari masing-masing variabel kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya penelitian terkait kualitas laporan keuangan pemerintah. Kemudian,

ada nya perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk di analisis kembali mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang membedakan pada penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian, waktu penelitian, serta masalah yang ada pada tempat penelitian.

Pemilihan SKPD Kabupaten Bantul DIY sebagai objek penelitian karena Kabupaten Bantul dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada laporan keuangannya. Maka dari itu diharapkan dengan adanya hasil audit BPK selama kurang lebih 4 tahun mempertahankan predikat WTP nya dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain, kemudian peneliti ingin mengaji lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang saat ini diperkuat Kabupaten Bantul sehingga bisa mempertahankan predikat WTP tersebut walaupun opini tersebut masih ada keterangannya dengan paragraf penjelas. Dengan adanya predikat ini maka dapat diartikan bahwa pihak pemerintah sudah mampu menjalankan pengelolaan keuangan dan asset secara benar serta telah sesuai dengan aturan yang sebagaimana sebagai wujud dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

## B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penulisan ini tidak menyimpang dan mengundang dari tujuan semula yang telah direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya meliput dalam 1 Kabupaten, yaitu kabupaten Bantul

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 4 variabel Independen, yaitu : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
3. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda
4. Dan Studi Empirisnya pada SKPD di Kabupaten Bantul, dengan kriteria : Pejabat/ Pegawai yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD.

## C. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuagan Pemerintah Daerah?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## E. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian diharapkan memiliki adanya kebermanfaatan bagi semua pihak yang membaca ataupun secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat daripenelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagi Praktisi

   Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat kontribusi dalam meningkatkan kualitas informasi akuntansi serta efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan dalam instansi pemerintah. Terlebih kaitannya dengan adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, dan teknologi informasi.

2. Bagi Akademisi

   Hasil dari penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat

dijadikan referensi ataupun tambahan data untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama.